

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber daya manusia. Pendidikan juga dipercaya sebagai wahana perluasan akses dan mobilitas sosial dalam masyarakat baik secara horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya semakin baik. Salah satu program pemerintah dalam rangka pemeratakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui pengalokasian dana yang memadai adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai pada bulan Juli tahun 2005.

Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program tersebut merupakan program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun.

Program dana BOS telah empat belas tahun bergulir sejak dicanangkan pada bulan Juli 2005, namun belum mampu memenuhi harapan masyarakat menikmati pendidikan dasar gratis seperti yang diamanatkan Undang-undang Dasar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, disebutkan bahwa setiap warga negara berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti

pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Dana BOS yang disediakan pemerintah tidak sedikit dan cenderung terus bertambah, tetapi sosialisasi dana BOS ini belum dilakukan dengan baik. Penyimpangan dana BOS pun terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Penyimpangan terjadi karena ketidaktahuan wali murid tentang dana BOS. Kurangnya informasi ini dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk memungut biaya dari siswa yang sebenarnya dapat dibiayai dari dana BOS. Penyusunan rencana penggunaan BOS yang diajukan oleh sekolah tidak mengikutsertakan wali murid dan tidak dicantumkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Hal ini mengakibatkan banyak wali murid yang tidak mengetahui BOS maupun penggunaannya.

Pada Tahun 2019, Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap belasan Kepala Sekolah Dasar (SD) di Langkat, terdapat juga permasalahan yang terkait dugaan korupsi pengutipan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) se-Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. OTT dilakukan terhadap pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di Ruang Kelas 1 B SD Negeri 050765 Lingsuangan IV, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang. OTT ini diawali pada Kamis (9/5/2019) pukul 10.00 WIB tentang adanya informasi telah terjadi pengutipan kepada semua Kepala Sekolah SD Negeri yang ada di Kecamatan Gebang yang

dilakukan oleh K3S Kecamatan Gebang di Ruang kelas 1 B SD Negeri 050765 dengan mengumpulkan belasan Kepsek. Kemudian mereka diminta untuk melakukan pembayaran uang administrasi setelah dana BOS Triwulan I cair dan masuk ke rekening masing-masing sekolah. Dana tersebut dikumpulkan oleh K3S Kecamatan Gebang dengan mengutip dana sebesar Rp15.000 dikalikan jumlah siswa masing-masing dari 31 sekolah se Kecamatan Gebang. (JPNN News, 9 Mei 2019).

Berdasarkan audit BPK atas pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2007 dan semester I 2008 pada 3.237 sekolah sampel di 33 provinsi, ditemukan nilai penyimpangan dana BOS kurang lebih Rp 28 miliar. Penyimpangan terjadi pada 2.054 atau 63,5 persen dari total sampel sekolah itu. Rata-rata penyimpangan setiap sekolah mencapai Rp 13,6 juta. Penyimpangan dana BOS yang terungkap antara lain dalam bentuk pemberian bantuan transportasi ke luar negeri, biaya sumbangan PGRI, dan insentif guru PNS.

BPK juga menemukan dana BOS digunakan untuk membeli buku di luar jenis buku dalam petunjuk teknis senilai Rp 1,219 miliar. Akibatnya, sebagian buku tidak bisa dimanfaatkan. Pada saat yang sama, BPK juga menemukan ada sisa dana BOS dan pendapatan jasa giro senilai Rp 23,393 miliar yang tidak disetor kembali ke kas negara. Dana BOS juga digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis senilai Rp 28,4 miliar. (Website BPK, 22 April 2018). Atas penyimpangan terhadap dana BOS tersebut maka BPK memberikan catatan atas ketidakwajaran pengelolaan dana BOS yang disebabkan karena sistem pengendalian intern yang tidak memadai dan ketidakpatuhan pada peraturan

perundang-undangan yang selanjutnya dirumuskan dalam temuan audit.

Berdasarkan temuan pemeriksaan BPK tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan pengelolaan dana BOS belum sepenuhnya andal karena tidak memenuhi karakteristik penyajian yang jujur. Informasi laporan keuangan harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan (PP 71 Tahun 2010). Kriteria laporan keuangan yang andal lainnya adalah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat diverifikasi dan bersifat netral (PP 71 Tahun 2010).

Keterandalan pelaporan keuangan dipengaruhi oleh pengendalian intern (Sri Rahayu, Yudi, Rahayu dan Ridwan 2018; Kadek Sutrisna, Putu Kurniawan, Putu Dewi 2017; YP Hutomo, Damayanti 2015; Sakriaty, Ridwan dan Abdul Kahar 2018; Saptari Umi, Yustina 2015. Sakriaty, Ridwan dan Abdul Kahar (2018) mengungkapkan bila suatu sekolah telah memiliki struktur organisasi yang baik dimana struktur organisasi tersebut dibentuk berdasarkan kebutuhan maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern di sekolah tersebut sudah berjalan dengan baik.

Latar belakang pentingnya menerapkan pengendalian internal karena beberapa isu pokok dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain adanya opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) oleh BPK atas laporan keuangan. Opini disclaimer yang diberikan BPK dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara/daerah.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern pemerintahan mempengaruhi keterandalan laporan keuangan dana BOS, dimana sistem pengendalian intern pemerintahan memiliki lima unsur yang dijadikan sebagai variabel (proksi/representasi) yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Swasta di Kota Medan)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk memungut biaya dari siswa yang sebenarnya dapat dibiayai oleh dana BOS
2. Penyusunan rencana penggunaan BOS yang diajukan oleh sekolah tidak mengikutsertakan wali murid dan tidak dicantumkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)
3. Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan OTT terhadap permasalahan korupsi pengutipan dana BOS
4. Berdasarkan audit BPK atas pengelolaan dana BOS, ditemukan nilai penyimpangan dana BOS kurang lebih Rp 28 miliar

5. Laporan keuangan pengelolaan dana BOS belum sepenuhnya andal karena tidak memenuhi karakteristik penyajian yang jujur
6. Terdapat kemungkinan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan (SPIP) mempengaruhi keterandalan laporan keuangan dana BOS
7. BPK menemukan dana BOS digunakan untuk membeli buku di luar jenis buku dalam petunjuk teknis.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih terarah dan jelas, maka perlu adanya batasan masalah demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Sehubungan dengan itu peneliti membatasi hanya pada Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Keterandalan Laporan Keuangan dana BOS Pada Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Swasta di Kota Medan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh lingkungan pengendalian terhadap keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana BOS pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kota Medan?
2. Apakah ada pengaruh penilaian risiko terhadap keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana BOS pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kota Medan?

3. Apakah ada pengaruh aktivitas pengendalian terhadap keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana BOS pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kota Medan?
4. Apakah ada pengaruh informasi dan komunikasi terhadap keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana BOS pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kota Medan?
5. Apakah ada pengaruh pemantauan terhadap keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana BOS pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kota Medan?
6. Apakah ada pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan terhadap keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana BOS pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Swasta?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian terhadap keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana BOS pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kota Medan
2. Mengetahui pengaruh penilaian risiko terhadap keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana BOS pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kota Medan

3. Mengetahui pengaruh aktivitas pengendalian terhadap keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana BOS pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kota Medan
4. Mengetahui pengaruh informasi dan komunikasi terhadap keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana BOS pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kota Medan
5. Mengetahui pengaruh pemantauan terhadap keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana BOS pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kota Medan
6. Mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan terhadap keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana BOS pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kota Medan

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana BOS. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya sebagai bahan masukan bagi peneliti lain dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang serta memberikan informasi tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi keterandalan laporan keuangan dana BOS.

2. Bagi Pihak Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui unsur SPIP yang dibutuhkan oleh sekolah yang berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan dana BOS.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menentukan kebijakan terkait dengan unsur SPIP yang berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan dana BOS.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi bahan referensi dalam mengatasi masalah yang serupa.

5. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan, sumbangan pikiran dan referensi ilmiah bagi para akademisi lainnya.